

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Polewali Mandar yang beribukota di Polewali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang secara geografis terletak antara 3^o 40' 00" - 3^o 32' 00" Lintang Selatan dan 118^o 40' 27" - 119^o 32' 27" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Data curah hujan sementara di Kabupaten Polewali Mandar diambil dari stasiun Balai Benih Lantora No. 442 C. Rerata curah hujan tahunan sekitar 1.902 mm dengan kisaran antara 1.422 – 3.306 mm dan jumlah rerata curah hujan bulanan berkisar dari 57 - 226 mm. Distribusi curah hujan bulanan tersebut menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Polewali Mandar mempunyai musim kemarau sekitar 2 bulan (Agustus-September), musim hujan atau bulan basah terjadi pada Nopember-Januari dan Maret-April, sedangkan kondisi hujan agak kurang terjadi pada bulan Pebruari, Mei, Juni, Juli, Oktober dan Nopember. Distribusi curah hujan bulanan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Polewali Mandar tergolong beriklim basah dengan curah hujan yang relatif tinggi.

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar ±2.022,30 km². Pada tahun 2010, Kabupaten Polewali Mandar secara administratif terdiri dari enam belas kecamatan dengan 144 desa dan 23 kelurahan. Tabel 2.1. berikut memperlihatkan luas wilayah per kecamatan, jumlah desa/kelurahan per kecamatan, dan persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten pada tahun 2009, sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Luas Daerah, Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan
dan Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

| No. | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Luas | Persentase |
|--------|----------------|--------------------|----------|------------|
| 1. | Tinambung | 8 | 21,34 | 1,06 |
| 2. | Balanipa | 11 | 37,42 | 1,85 |
| 3. | Limboro | 11 | 47,55 | 2,35 |
| 4. | Tubbi Taramanu | 13 | 356,95 | 17,65 |
| 5. | Alu | 8 | 228,30 | 11,29 |
| 6. | Campalagian | 18 | 87,84 | 4,34 |
| 7. | Luyo | 11 | 156,60 | 7,74 |
| 8. | Wonomulyo | 14 | 72,82 | 3,60 |
| 9. | Mapilli | 12 | 79,66 | 3,94 |
| 10. | Tapango | 14 | 125,81 | 6,22 |
| 11. | Matakali | 7 | 57,62 | 2,85 |
| 12. | Polewali | 9 | 26,27 | 1,30 |
| 13. | Binuang | 10 | 123,34 | 6,10 |
| 14. | Anreapi | 5 | 124,62 | 6,16 |
| 15. | Matangnga | 7 | 234,92 | 11,62 |
| 16. | Bulo | 9 | 241,24 | 11,93 |
| Jumlah | | 167 | 2.022,30 | 100,00 |

Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2010

Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Tubbi Taramanu, yakni sekitar $\pm 356,95 \text{ km}^2$ atau sekitar 17.65% dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Kecamatan Tinambung merupakan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil, yakni sekitar $\pm 21,34 \text{ km}^2$ atau sekitar 1,06% dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar sangat kaya dengan sumber daya air sungai, yang terdiri atas sungai besar dan kecil. Tiga sungai besar mengapit wilayah ini yaitu sungai Galang-galang yang menjadi batas dengan Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan) dan sungai Tinambung dengan debit air yang sangat besar, melewati Kecamatan Tubbi Taramanu, Alu, Limboro, Tinambung dan bermuara di Teluk

Mandar. Selain itu, terdapat sungai Mapilli yang merupakan sungai terbesar dengan lebar muara kurang lebih 500 meter berasal dari aliran sungai Matangnga, dan Masunni melewati Mapilli dan Kecamatan Campalagian dan juga bermuara di Teluk Mandar. Di Sungai Mapilli yakni di Sekka-sekka telah dibangun bendungan untuk keperluan irigasi pertanian di Kecamatan Mapilli, Wonomulyo, Luyo dan Campalagian.

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP 2010) mencapai 396.120 jiwa yang terdiri dari 193.108 jiwa penduduk laki-laki dan 203.012 perempuan. Adapun perkembangan kondisi kependudukan daerah secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Perkembangan Kondisi Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar

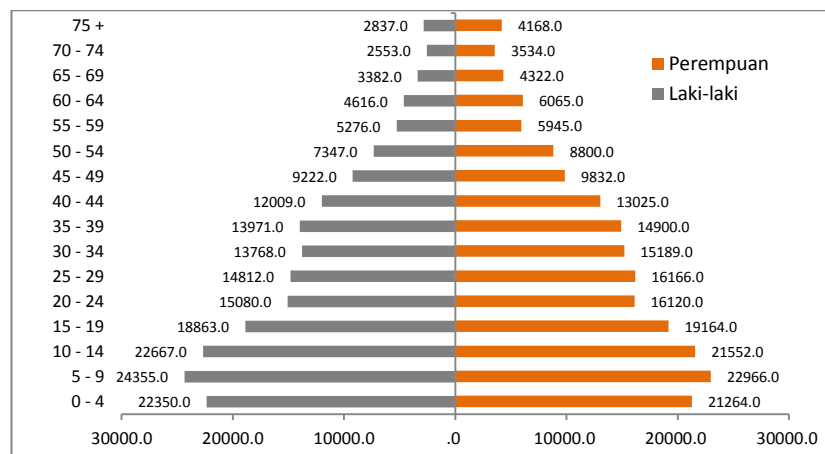
| No. | Keadaan | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
|-----|--|--------------------|----------------------------------|
| 1. | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 373.263 | 396.120 ^{*)} |
| 2. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin : | | |
| | - Penduduk Laki-Laki (Jiwa) | 181.660 | 193.108 ^{*)} |
| | - Penduduk Perempuan (Jiwa) | 191.603 | 203.012 ^{*)} |
| 2. | Jumlah Rumah Tangga (RT) | 80.162 | 87.943 ^{*)} |
| 3. | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) | 185 | 195 ^{*)} |
| 4. | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) | 79.766 (21,37%) | 84.300 ^{*)} (21,24%) |
| 5. | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 0,50 | 1,44 ^{*)} |
| 6. | Jumlah Penduduk Menurut Tipe Daerah : | | |
| | - Perkotaan (Jiwa) | 92.833 | 106.688 ^{*)} |
| | - Perdesaan (Jiwa) | 280.430 | 289.432 ^{*)} |

Sumber : BPS Polewali Mandar, 2011

Keterangan : ^{*)} Angka sangat sementara

Untuk mengetahui struktur atau susunan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan piramida penduduk pada Grafik 1, struktur penduduk Kabupaten Polewali Mandar tergolong penduduk muda. Persentase penduduk umur muda relatif lebih banyak daripada penduduk umur tua.

Grafik 1
Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010



Sumber : BPS Polewali Mandar, 2011 (Angka sangat sementara)

Dari piramida penduduk di atas terlihat bahwa kelompok umur terbesar berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 47.321 jiwa, yang terdiri dari 24.355 laki-laki dan 22.966 perempuan. Sedangkan kelompok umur terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 6.087 jiwa, yang terdiri dari 2.553 laki-laki dan 3.534 perempuan.

Penduduk Polewali Mandar berdasarkan kelompok umur, terdiri dari 34,12 persen penduduk berusia 0-14 tahun; 60,63 persen penduduk berusia 15-64 tahun; dan 5,25 persen berusia 65 tahun ke atas.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 10,01 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2010 Kabupaten Polewali Mandar hampir separuhnya didorong oleh

sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor perdagangan, restoran dan hotel. Pertumbuhan sektor pertanian sebesar 10,74 persen, pertumbuhan ini sangat signifikan peningkatannya bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2009 yang hanya mencapai 1,84 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2010 sebesar 4,25 persen, kemudian sektor jasa-jasa sebesar 13,44 persen.

Nilai PDRB, baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar
 Tahun 2008 – 2010

| No. | Indikator | Satuan | Realisasi | | |
|-----|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Juta Rp. | 2.192.039,00 | 2.547.248,75 | 3.095.445,75 ^{*)} |
| 2. | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) | Juta Rp. | 1.223.506,70 | 1.283.751,47 | 1.413.989,98 ^{*)} |

Sumber : BPS Polewali Mandar, 2011

Keterangan : ^{*)} Angka sangat sementara

Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang tercermin pada komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pendapatan.

Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia. Indeks Pendidikan pada tahun 2009 mencapai angka 71,20 meningkat dari tahun 2008 yang mencapai angka 70,8.

Angka Melek Huruf (AMH), yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya), juga

mengalami peningkatan, meskipun sangat kecil, yaitu dari 83,50% pada tahun 2008 menjadi 83,81% pada tahun 2009.

Sementara untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan lamanya penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bersekolah (dalam tahun) juga mengalami peningkatan, pada tahun 2008 mencapai 6,81 tahun dan mencapai 6,90 tahun pada tahun 2009. Meskipun begitu pada tahun 2009, indeks lama sekolah Kabupaten Polewali Mandar sebesar 45,98. Artinya, pencapaian menuju rata-rata lama sekolah ideal (15 tahun), baru ditempuh sekitar 45,98 persen. Dengan melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

Indeks Kesehatan

Mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir (AHH_{e0}). Pada tahun 2009, indeks kesehatan Polewali Mandar mencapai angka 66,19 atau meningkat 0,46 poin dari tahun 2008 yang mencapai 65,73 poin. Angka tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang dilihat dari meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Polewali Mandar dari 64,44 tahun pada tahun 2008 menjadi 64,71 tahun pada tahun 2009.

Indeks Pendapatan (Indeks Paritas Daya Beli)

Kemampuan daya beli masyarakat sebagai komponen utama IPM, terus mengalami peningkatan pada periode 2007 – 2009, yakni dari Rp 619,30 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp 624,77 ribu pada tahun 2008, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2009 menjadi Rp 630,16 ribu. Kemampuan daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan jasa).

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan SDM adalah melalui pendidikan dengan mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, dan membuka akses yang semakin luas agar pemerataan pendidikan dapat diwujudkan. Program ini diharapkan akan mempercepat terciptanya kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi. Keadaan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar meliputi jumlah sekolah, murid dan guru,

mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) adalah sebagai berikut : sebanyak 89 sekolah TK menampung 2.804 murid, dengan jumlah guru sebanyak 102 orang, dan kelompok bermain sebanyak 204 kelompok tersebar di 16 kecamatan dengan total siswa yang tertampung didalam kelompok adalah 3.266 siswa. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 314 SD, dan MI sebanyak 60 sekolah yang menampung 59.639 murid, dan diasuh oleh 1.827 guru. Jumlah SMP/ sederajat adalah 54 SMP Negeri, 3 SMP Swasta, 7 SMP Terbuka dan 27 MTs yang menampung sebanyak 14.794 siswa dan diasuh oleh 546 guru. Jumlah SMA/ sederajat adalah 11 Sekolah SMA Negeri, SMK sebanyak 18 sekolah, Madrasah Aliyah (MA) 8 sekolah yang menampung sebanyak 10.507 siswa dan diasuh oleh 259 guru, serta terdapat 4 perguruan tinggi swasta yakni Unasman, STAI DDI, STIKES Bina Generasi, dan STIKES YPPP Wonomulyo. Keadaan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Tingkat Pendidikan dan Guru di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

| Tingkat Pendidikan | Sarana Pendidikan (Buah) | Peserta Didik (Orang) | Guru (Orang) |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Klpk. Bermain | 204 | 3.266 | |
| TK | 89 | 2.804 | 102 |
| SD/MI | 374 | 59.639 | 1.827 |
| SMTp | 91 | 14.794 | 546 |
| SMTA | 37 | 10.507 | 259 |
| PT | 4 | | |

Sumber: Disdikpora Kab. Polewali Mandar, 2010

Dari Tabel 2.4. di atas dapat terlihat dimana tingkat pendidikan yang memerlukan perhatian dan pembinaan maksimal, sehingga dapat mencapai pada tingkat pendidikan dengan kematangan berpikir dan usia produktif untuk bekerja. Tingkat pendidikan SD mempunyai peserta didik terbanyak.

Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya 1 (satu) buah perpustakaan pemerintah daerah yang pada tahun 2010 memiliki berbagai koleksi buku sebanyak 4.886 judul dan 9.087 exemplar. Namun demikian, minat baca masyarakat Polewali Mandar pada umumnya masih relatif rendah ditunjukkan jumlah

pengunjung ke perpustakaan daerah hanya mencapai 4.058 orang pada tahun 2010 yang terdiri atas 0,39% TK, 5,35% SD, 14,91% SMP, 29,82% SMU, 41,74% mahasiswa, 4,53% PNS dan 3,25% umum. (Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Polewali Mandar, 2011)

Kesehatan

Tujuan dari Pembangunan kesehatan adalah pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yaitu terwujudnya keadaan sehat fisik-jasmani, rohani-spritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai derajat kesehatan ini, pembangunan kesehatan harus menyangkut seluruh kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka akan berdampak langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes termasuk RSUD terus mengalami peningkatan. Tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan serta tenaga kesehatan lainnya merupakan sumber daya manusia kesehatan (SDMKes) yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan data kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2010 ada 11 dokter spesialis, 57 dokter umum, 22 dokter gigi, 208 bidan, 328 perawat, 19 petugas gizi, 20 sanitarian, 23 analisis laboratorium dan beberapa petugas kesehatan lainnya.

Sampai tahun 2010 Kabupaten Polewali Mandar memiliki 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit ABRI, dan Rumah Sakit Bersalin. Sedangkan jumlah puskesmas sebanyak 20 unit, 59 Pustu dan 58 Poskesdes.

Lingkungan Hidup

Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah sebesar $\pm 2.022,30 \text{ km}^2$ dengan proporsi hutan yang cukup besar yaitu sekitar 47,5 persen dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Total luas kawasan hutan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 sekitar $\pm 94.126 \text{ ha}$ dan 33 persen dari total luas hutan yang ada merupakan hutan lindung, yaitu $\pm 69.464,9 \text{ ha}$.

Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar memperoleh akses air bersih melalui sumur pompa tangan (SPT), sumur gali (SGL), penampungan air hujan (PAH), air kemasan, dan lainnya. Sebagian besar masyarakat belum dapat memperoleh akses air bersih dari PDAM, masyarakat yang menggunakan sumur gali masih di atas dua puluh persen. Kebutuhan air baku terutama bagi masyarakat perdesaan saat ini masih

memanfaatkan sumber air permukaan dan mata air serta sebagian masih menggunakan sumur bor.

Penanganan persampahan di Kabupaten Polewali Mandar secara umum masih relatif rendah. Volume sampah yang ditangani sebesar 26,30 persen dari total volume produksi sampah sebanyak 14.600.000 kg. Luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Polewali Mandar sampai tahun 2010 seluas 260,25 ha atau sama dengan 0,13% dari total luas wilayah kabupaten.

Perhubungan

Aspek perhubungan terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Transportasi merupakan salah satu sarana penunjang utama untuk memperlancar kegiatan perekonomian, khususnya aliran manusia dan barang. Usaha pembangunan yang semakin meningkat menuntut adanya transportasi yang menunjang mobilitas penduduk dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Sistem jaringan transportasi yang ada saat ini di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan perkeretaapian serta sistem jaringan transportasi udara masih dalam tahap perencanaan. Gambaran kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Polewali Mandar dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Transportasi Darat

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 ±1.533,74 kilometer. Panjang jalan ini bertambah sepanjang ±69,74 km dari tahun sebelumnya. Kondisi jalan yang ada terdiri dari kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Panjang jalan yang kondisinya baik kurang lebih 343,99 km, kondisi sedang ±161 km, kondisi rusak ±735,35 km, dan kondisi rusak berat ±293,40 km.

Sedangkan untuk jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 sebanyak 51.013 unit kendaraan. Kendaraan bermotor tersebut terdiri dari 272 unit mobil penumpang, 766 unit mobil truk, 221 unit mobil bus dan yang merupakan jumlah terbesar adalah kendaraan sepeda motor dengan jumlah 1.573 unit.

Bagian dari sistem transportasi darat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar selain jaringan lalu lintas angkutan jalan, juga terdapat angkutan penyeberangan, yaitu penyeberangan dari Tonyaman ke Pulau Battoa sepanjang ±1,5 kilometer, dan dari Tonyaman ke Pulau Tangnga sepanjang ±3,5 kilometer.

b) Transportasi Laut

Sepanjang tahun 2009 di Kabupaten Polewali Mandar terdapat kunjungan kapal sebanyak 470 kunjungan, semua merupakan pelayaran rakyat. memperhatikan jumlah kunjungan kapal, maka jumlah kunjungan kapal sepanjang tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006 yang berjumlah 410 kunjungan. Begitu juga dengan lalu lintas bongkar muat barang mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan kapal yang mengalami peningkatan tersebut dilakukan di Pelabuhan Labuang Kecamatan Campalagian dan Pelabuhan Karama di Kecamatan Tinambung, Pelabuhan Polewali yang direlokasi ke Pelabuhan Tanjungsilopo di Kecamatan Binuang, sampai saat ini belum bisa beroperasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum tersedia, seperti jalan akses ke pelabuhan belum selesai, pergudangan, area parkir, listrik dan air bersih sampai saat ini belum tersedia.

Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia disamping makanan dan pakaian. Berdasarkan sifat tersebut, maka permintaan unit rumah akan terus terjadi dan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya permintaan rumah harus diimbangi dengan penyediaan akan kebutuhan perumahan bagi penduduk. Informasi tentang perumahan menjadi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat telah menikmati rumah.

Pada umumnya rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar sudah tinggal di rumah sendiri. Pada tahun 2009, persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut : milik sendiri 87,29 persen, kontrak/sewa 1,39 persen, bebas sewa 0,30 persen, dinas 1,29 persen, dan milik orang tua/sanak saudara lainnya 9,72 persen. (*Sumber : BPS Polewali Mandar*).

Tempat Ibadah

Berdasarkan data tahun 2010 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, fasilitas atau tempat ibadah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar meliputi Masjid sebanyak 765 buah, Musholla sebanyak 57 buah, Gereja Protestan sebanyak 45 buah, dan Gereja Katholik sebanyak 10 buah. Tempat ibadah bagi masing-masing penganut agama yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, dianggap cukup memadai. Kecuali untuk penganut Agama Hindu yang jumlahnya 207 orang belum

tersedia tempat ibadah bagi mereka, begitu pula tempat ibadah bagi penganut Agama Budha belum tersedia, yang saat ini di Kabupaten Polewali Mandar tidak ada penduduk yang menjadi pemeluk Agama Budha.

Masjid dan Mushollah merupakan tempat ibadah terbanyak dan tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan, sesuai dengan jumlah pemeluk Agama Islam yang merupakan jumlah terbesar di Kabupaten Polewali Mandar.

Komunikasi dan Informatika

Saat ini, keperluan telekomunikasi di Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya dilakukan dengan menggunakan fasilitas telepon. Sambungan telepon yang digunakan di Kabupaten Polewali Mandar disediakan oleh pihak PT.Telkom, dilayani dengan sistem Sentral Telepon Otomatis (STO) yang terletak di Polewali ibukota Kabupaten Polewali Mandar. Cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi (sambungan telepon) belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Namun demikian, akibat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, maka jaringan telekomunikasi bergerak (*selular*) sudah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya diantaranya : (1) saat ini 84 desa telah memiliki Satelit Komunikasi Perdesaan/*Universal Service Obligation* (USO) yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo; (2) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pada 26 titik, minus kecamatan Matangnga, Tutar, Alu dan Anreapi; (3) Warung Informasi Masyarakat yang merupakan bantuan KPDT.

Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan informasi yang ada, surat kabar nasional yang ada berjumlah 4, surat kabar regional berjumlah 3 dan jumlah surat kabar lokal sebanyak 1 surat kabar. sedangkan Media internal yang ada berjumlah 2 majalah. Untuk penyiaran radio yang masuk ke daerah adalah sebanyak 2 buah stasiun radio. (*Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi*).

Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan

tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2010 adalah sebanyak 129.162 jiwa atau 32,61% dari jumlah penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Pada tahun 2010, jumlah sarana olahraga adalah 5 buah gedung olahraga, 1 buah stadion, dan 25 buah lapangan. Pada tahun yang sama, jumlah organisasi/klub olahraga mencapai 28 unit induk olahraga, 121 unit organisasi/klub olahraga pelajar, dan 228 organisasi/klub olahraga masyarakat. Sedangkan organisasi kepemudaan berjumlah 45 unit. (Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga).

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur sebagai berikut :

- a. *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita* (Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita). Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Di Kabupaten Polewali Mandar menurut golongan pengeluarannya, tahun 2008 sebanyak 44,40 persen penduduk memiliki pengeluaran per kapita antara Rp.200.000 – Rp.299.999. Kondisi ini agak bergeser pada tahun 2009, dimana penduduk yang berada pada golongan pengeluaran tersebut hanya 35,95 persen. Sementara itu penduduk pada golongan pengeluaran Rp.300.000 – Rp. 499.000 bertambah menjadi 30,19 persen pada tahun 2009 dari 25,91 persen pada tahun 2008.
- b. *Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita*. Pengeluaran rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (non pangan). Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan, maka

dapat diasumsikan tingkat kesejahteraan rumah tangga semakin baik. Rata-rata penduduk di Kabupaten Polewali Mandar masih menggunakan lebih dari 50 persen pendapatannya untuk mengkonsumsi makanan yaitu sebanyak 59,41 persen pada tahun 2009. Kondisi tersebut boleh dikatakan baik jika dibandingkan tahun 2008, dimana persentase pengeluaran untuk makanan masih sebanyak 61,62 persen.

- c. *Sektor Tanaman Pangan.* Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah penghasil tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Barat. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Kabupaten Polewali Mandar adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Produksi padi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009 sebesar 195.906,00 ton yang dipanen dari areal seluas 29.368 ha atau rata-rata 6,67 ton per hektar yang berarti turun sekitar 4,95 persen dibandingkan dengan tahun 2008, yang menghasilkan 206.082 ton padi dengan luas panen 31.224 ha atau rata-rata produksi 6,6 ton per hektar. Sebagian besar produksi padi di Kabupaten Polewali Mandar dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 97,33 persen dari seluruh produksi padi atau sebesar 190.678 ton. Sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi ladang. Produksi jagung Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 sebesar 4.562 ton dengan luas panen 1.509 ha atau menghasilkan rata-rata 3,02 ton/ha.
- d. *Sektor Peternakan.* Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda pada tahun 2009 secara berturut-turut adalah 31.091 ekor, 2.697 ekor dan 5.897 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak kecil yang terdiri dari kambing sebesar 167.614 ekor dan babi sebesar 11.150 ekor. Untuk populasi unggas pada tahun 2009, ayam buras berjumlah 3.684.601 ekor, ayam ras petelur sebesar 5.580 ekor, ayam ras pedaging 1.162.800 ekor dan itik sebesar 1.293.228 ekor.
- e. *Sektor Kehutanan.* Produksi hasil hutan terdiri dari kayu dan non kayu (seperti rotan). Produksi hutan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 yang berupa kayu sebesar 627,082 kubik. Hasil lainnya yakni rotan sebesar 469,70 ton.
- f. *Sektor Tanaman Perkebunan.* Di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 luas areal tanaman perkebunan rakyat secara keseluruhan sebesar 83.131,11 ha, dari seluas ini sebesar 59.055,62 ha merupakan luas tanaman perkebunan rakyat yang menghasilkan. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2009 yang terbesar produksinya adalah tanaman kakao dan kelapa dalam masing-masing sebesar 28.323,88 ton dan 18.934,21 ton.

- g. *Sektor Perikanan.* Produksi perikanan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 tercatat 34.607,22 ton, yang terdiri dari 24.079,70 ton produksi perikanan laut dan 10.528 ton perikanan darat. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan sebesar 4,38 persen dibanding tahun 2008. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 2.268 unit pada tahun 2008, menjadi 2.271 unit pada tahun 2009, yaitu masing-masing perahu/kapal penangkap ikan tak bermotor sebanyak 412 unit, motor tempel sebanyak 1.097 unit dan kapal motor sebanyak 762 unit.
- h. *Sektor Perdagangan dan Koperasi.* Jumlah perusahaan yang memperoleh surat izin usaha perdagangan selama tahun 2009 sebanyak 954 perusahaan perdagangan, yang terdiri dari 915 perdagangan kecil, 39 perdagangan menengah dan tidak ada perdagangan besar. Jumlah ini meningkat sebesar 84,17 persen dibanding tahun 2008 yang mana perusahaan yang memperoleh izin usaha sebanyak 518 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang memperoleh tanda daftar perusahaan sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 1982 di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2009 ada 954 perusahaan, jumlah ini juga meningkat sebesar 54,62 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 617 perusahaan. Jumlah koperasi di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 sebanyak 238 koperasi yang terdiri dari 220 koperasi non KUD dan 18 koperasi KUD.
- i. *Industri dan Investasi.* Pada tahun 2009 perusahaan industri kecil di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 6.681 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 13.583 orang. Jumlah perusahaan sama dengan jumlah perusahaan pada tahun 2008. Namun walaupun jumlah perusahaan sama, jumlah tenaga kerja mengalami sedikit peningkatan dimana tahun 2008 jumlah tenaga kerja adalah 13.554 orang. Untuk nilai investasi juga sama dengan tahun 2008, sedangkan nilai produksi industri kecil mengalami sedikit peningkatan. Nilai Investasi di tahun 2009 sebesar Rp. 27.841.900 sedangkan untuk nilai produksi di tahun 2008 sebesar Rp. 140.368.600 menjadi Rp.141.495.600 di tahun 2009 atau meningkat sebesar 0,80%. Secara keseluruhan ada 104 sentra industri kecil dari 22 jenis sentra industri di Kabupaten Polewali Mandar.

Iklm Berinvestasi

Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas dan lahan yang tersedia untuk pengembangan berbagai sektor untuk

penanaman modal. Akan tetapi, dibidang investasi daerah, masih dijumpai berbagai permasalahan terkait dengan upaya penciptaan iklim penanaman modal yang sehat. Beberapa diantaranya adalah: (i) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang belum banyak menarik kalangan investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten ini; (ii) Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah. Dengan kata lain, tanpa adanya dukungan prasarana, sarana dan peraturan perundangan yang memadai maka sulit diharapkan untuk dapat membuat investor tertarik masuk ke Kabupaten Polewali Mandar. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana seperti, jalan, telekomunikasi, listrik, air, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan penyiapan lahan yang siap pakai.

Sumber Daya Manusia

Di Provinsi Sulawesi Barat, Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan kabupaten lain, sehingga merupakan asset penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan di Polewali Mandar. Apalagi, berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dan penduduk usia di atas 64 tahun, yaitu masing-masing sebesar 60,63%, 34,12% dan 5,25%. Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 64,93 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Polewali Mandar menanggung sekitar 65 orang penduduk usia belum/tidak produktif.

Di pihak lain, berdasarkan data hasil Susenas 2009, kualitas tenaga kerja masih merupakan permasalahan di Kabupaten Polewali Mandar mengingat penduduk yang berpendidikan SLTP/ sederajat sekitar 17,28%, SMU/ sederajat sebesar 18,70% dan perguruan tinggi sebesar 3,58%.

Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi

satu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dilihat dari bidang urusan kewenangan sebagai berikut :

Urusan Wajib :

➤ Bidang Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009-2014 telah menentukan target yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Target itu antara lain adalah: Angka Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah berdasarkan data sektor ditargetkan mencapai 75%. Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan pertama ditargetkan mencapai 95%. Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar di targetkan mencapai 95%. Angka kelulusan SD dan SMP ditargetkan mencapai 100%. Angka Putus Sekolah ditargetkan turun 2%.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut di atas berbagai strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar antara lain dengan melaksanakan program yakni : pendidikan usia dini; wajib belajar 9 tahun; pendidikan menengah; pendidikan non formal; pendidikan luar sekolah; peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; pengembangan budaya dan pembinaan perpustakaan; manajemen pelayanan pendidikan.

Angka partisipasi pendidikan pra sekolah di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat rendah walaupun terdapat kenaikan dari 15,89% tahun 2009 menjadi 19,89% di tahun 2010. Persentase partisipasi sekolah dasar usia 7–12 tahun di Kabupaten Polewali Mandar adalah 83,53% tahun 2009 dan 97,41% di tahun 2010. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) 7–12 tahun tersebut sudah melampaui target nasional sebesar 95%, ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7–12 tahun hampir semuanya sudah bersekolah di jenjang SD. Pencapaian APM SMP tahun 2010 adalah 56,54%, hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar

43,44% anak usia 13–15 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SMP dan sederajat. Proporsi Murid Kelas I yang berhasil menamatkan SD pada tahun 2008 sebesar 85,60% dan pada tahun 2009 sebesar 74,60%. Sampai dengan akhir tahun 2010 terdapat 10,93% penduduk usia 12 tahun yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau tidak menyelesaikan pendidikan di SD/MI sederajat. Berdasarkan hasil pengumpulan data sektoral di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2008–2010, proporsi murid kelas I yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun dari persentase 55,59% tahun 2008 menjadi 47,64% pada tahun 2009, dan terus menurun menjadi 44,47%. Angka kelulusan SD capaian tahun 2008 sebesar 98,46%, tahun 2009 sebesar 90,01% dan siswa tingkat 6 SD/MI sederajat yang tidak lulus mengikuti ujian akhir pada jenjang SD/MI sederajat sebesar 8,43% pada tahun 2010. Angka kelulusan SMP/MTs sederajat pada tahun 2009 sebesar 75,60%, terdapat penurunan 6,96% siswa SMP/MTs sederajat yang lulus tahun 2010.

Angka putus sekolah memberikan gambaran mengenai efisiensi proses belajar mengajar dan merupakan indikator proses dalam pendidikan. Dengan mengetahui angka putus sekolah, dapat dilakukan upaya pencegahan bagi siswa yang memiliki potensi untuk putus sekolah, dan mengembalikan ke sekolah bagi anak yang putus sekolah. Angka putus sekolah di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2008–2010 menunjukkan capaian bahwa tidak sampai 1% dari total siswa yang putus sekolah,

Angka melanjutkan ke SMP, Indikator ini untuk menggambarkan kemajuan siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs sederajat setelah lulus dari jenjang pendidikan SD/MI sederajat. Angka melanjutkan ke SMP di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2009 ke tahun 2010 ini tidak mengalami peningkatan yakni 87,07%. Angka Melanjutkan ke sekolah menengah, indikator ini juga untuk memantau siswa yang menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan ke pendidikan menengah. Angka melanjutkan ke sekolah menengah adalah perbandingan siswa baru di tingkat SMA/MA sederajat dengan banyaknya lulusan SMP/MTs sederajat. Capaian dari tahun 2009 sebesar 65,92% ini meningkat pada tahun 2010 sebesar 93,87%.

➤ **Bidang Kesehatan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 telah menentukan target antara lain yang akan menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Target tersebut

antara lain adalah: Angka Kematian Balita turun 5 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi turun 2 per 1000 kelahiran hidup. Persentasi BBLR turun hingga 1%. Persentase pemberian vitamin A mencapai 90%. Cakupan pemberian ASI Eksklusif mencapai 90%. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan mencapai 90%. Cakupan kunjungan K4 mencapai 90%.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut secara keseluruhan untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan dalam mencapai MDGs, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam bentuk pelaksanaan program yakni: upaya kesehatan masyarakat; pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; pengawasan obat dan makanan; promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; perbaikan gizi masyarakat; pengembangan lingkungan sehat; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; standarisasi pelayanan kesehatan; kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; pengadaan/peningkatan perbaikan sarana dan prasarana PKM, pustu dan jaringannya; peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; peningkatan pelayanan lansia; kesehatan ibu dan anak.

Sasaran yang akan dicapai dengan serangkaian program yang dilakukan yakni: (1)meningkatnya pelayanan obat di puskesmas; (2)meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kesehatan; (3)meningkatnya ketersediaan air bersih; (4)meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu; (5)meningkatnya pemahaman serta perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih; (6)menurunnya persentase gizi buruk, dan ibu hamil KEK; (7)meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan penyakit menular; (8)terpenuhinya pengobatan dan pembiayaan bagi masyarakat miskin; (9)meningkatnya ketercakupannya sarana dan prasarana kesehatan di masyarakat; dan (10) menurunnya jumlah kematian ibu dan anak. Sekitar 13 (tiga belas) Program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar dengan hasil capaian berdasarkan data sektor MDGs. Kondisi terkait pada bidang kesehatan anak yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dari hasil data sektor MDGs tahun 2010 meliputi antara lain: Angka Kematian Bayi (AKB) berkisar 35 per 1000 kelahiran hidup (96 orang), sedangkan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) sebesar 0,4 per 1000 kelahiran hidup (4 balita), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebesar 212 bayi dari 7.193 bayi lahir hidup atau 2,95%, proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar 7.388 anak atau 92,44%, pemberian ASI eksklusif sebesar 55,22%, persentase balita dengan Bawah Garis Merah (BGM) sebesar 780 balita atau 3,17%, persentase balita yang naik berat badannya sesuai

garis pertumbuhan sebesar 73,85%, dan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 96 dari 160 atau 57,83%. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2010 sebanyak 13 orang, persentase kunjungan K4 sebesar 81,34%, persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 81,94%. Angka pemakaian alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15–49 tahun sebesar 35.215 atau 59,88%, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meningkat sebesar 93,03% dari target dan tahun sebelumnya, cakupan pelayanan nifas sebesar 77,16%.

➤ **Bidang Lingkungan Hidup**

Capaian kinerja bidang lingkungan hidup dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Penanganan sampah; Volume sampah yang didatangi sebanyak 3.840.000 Kg dibagi dengan volume produksi sampah sebanyak 14.600.000 Kg, dengan capaian kinerja 26,30%;
- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi sebanyak 127 perusahaan dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL sebanyak 127 perusahaan, dengan capaian kinerja 100%;
- Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk; Jumlah daya tampung TPS sebanyak 8.589.751 Kg dibagi dengan jumlah penduduk sebanyak 373.263 orang, dengan capaian kinerja 23,01 m³/jiwa.
- Penegakan hukum lingkungan; Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda sebanyak 4 kasus dibagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada sebanyak 4 kasus, dengan capaian kinerja 100%.

➤ **Bidang Pekerjaan Umum**

Capaian kinerja bidang pekerjaan umum dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 343,99 Km dibagi jumlah panjang seluruh jalan kabupaten sepanjang 1.533,74 Km, dengan capaian kinerja 22,43%;
- Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik; Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik seluas 13.437 Ha dibagi luas irigasi kabupaten seluas 20.801 Ha, dengan capaian kinerja 64,60%;

- Rumah tangga bersanitasi; Rumah tangga bersanitasi sebanyak 41.176 rumah tangga dibagi jumlah total rumah tangga sebanyak 347.537 rumah tangga, dengan capaian kinerja 11,83%;
- Kawasan kumuh; Kawasan kumuh sebanyak 260,25 Ha dibagi luas wilayah 202.200 Ha, dengan capaian kinerja 0,13%.

➤ Bidang Tata Ruang

Capaian kinerja bidang tata ruang dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah ber HPL/HGB; Luas ruang terbuka hijau sebanyak 90,2 Ha dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB sebanyak 225,5 Ha, dengan capaian kinerja 40%.

➤ Bidang Perumahan

Capaian kinerja bidang perumahan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Rumah tangga yang menggunakan air bersih; Jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 7.480 rumah tangga dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 80.162 rumah tangga, dengan capaian kinerja 9,33%;
- Lingkungan permukiman kumuh; Luas lingkungan permukiman kumuh seluas 260,25 Ha dibagi dengan luas wilayah seluas 202.200 Ha, dengan capaian kinerja 0,13%;
- Rumah layak huni; Jumlah rumah layak huni sebanyak 44.757 rumah dibagi dengan jumlah seluruh rumah di wilayah kabupaten sebanyak 80.162 rumah, dengan capaian kinerja 55,83%.

➤ Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Walaupun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 tidak ditentukan target, namun Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap memberikan perhatian pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga melalui: program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan dan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar, mempunyai permasalahan yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, masih banyaknya pengangguran, perilaku menyimpang dan kurangnya kesadaran sosial dikalangan pemuda. Untuk itu diperlukan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, memperkecil angka kemiskinan, pengangguran dan penyimpangan perilaku, serta meningkatkan kesadaran sosial dikalangan Pemuda. Sehingga Kabupaten Polewali Mandar ke depan dapat menjadi rujukan bagi kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dalam pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga. Permasalahan lain adalah pembinaan dan pengembangan/pembangunan olahraga rekreasi, prestasi maupun olahraga masyarakat yang perlu dukungan sarana dan prasarana memadai.

➤ **Bidang Koperasi dan UMKM**

Capaian kinerja bidang koperasi dan UMKM dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Persentase jumlah koperasi aktif; Jumlah koperasi aktif sebanyak 195 unit dibagi dengan jumlah seluruh koperasi sebanyak 242 unit, dengan capaian kinerja 80%.
- Persentase Usaha Mikro dan Kecil; Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 4.300 unit dibagi dengan jumlah seluruh UMKM yang ada sebanyak 5.840 unit, dengan capaian kinerja 73%.

➤ **Bidang Ketenagakerjaan**

Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja; Jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 362.900 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 271.848 orang, dengan capaian kinerja 133,49%.
- Persentase pekerja yang ditempatkan; Jumlah pekerja yang ditempatkan sebanyak 113.989 orang dibagi dengan jumlah pekerja yang mendaftar sebanyak 5.208 orang, dengan capaian kinerja 2.188,72%.

➤ **Bidang Ketahanan Pangan**

Capaian kinerja bidang ketahanan pangan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Regulasi Ketahanan Pangan; Ada atau tidaknya peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Perda/Perkada, dengan capaian kinerja tidak ada.
- Ketersediaan pangan utama; Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) sebanyak 119.375.610 Kg dibagi jumlah penduduk sebanyak 373.263 jiwa, dengan capaian kinerja 319.816,35 Kg/jiwa.

➤ Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 telah menentukan target pada bidang pemberdayaan perempuan yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Target tersebut antara lain adalah: Rasio APM anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat SD berdasarkan data survei ditargetkan 100%. Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat SLTP berdasarkan data survei ditargetkan 100%. Rasio melek huruf perempuan terhadap anak laki-laki berdasarkan data survei ditargetkan 100%. Kontribusi perempuan dalam kerja upahan terhadap laki-laki berdasarkan data survei ditargetkan 50%. Proporsi Kursi DPRD yang diduduki oleh perempuan berdasarkan data sektor mencapai 30%. Persentase camat perempuan ditargetkan mencapai 30%. Presentase lurah/kades perempuan ditargetkan mencapai 30%. Rasio pejabat perempuan di lingkup Pemkab Polewali Mandar Eselon II ditargetkan 5%, Eselon III ditargetkan 30%, Eselon IV/a ditargetkan 35%, dan Eselon IV/b ditargetkan 40%. Persentase perempuan sebagai pengurus partai dan organisasi sosial ditargetkan mencapai 30%. Persentase peserta KB perempuan dan laki-laki ditargetkan turun 90%.

Sedangkan pada bidang perlindungan anak berdasarkan laporan ASIA Berbasis HAM yang akan menjadi prioritas adalah pemenuhan hak akan kesehatan dan kesejahteraan, hak untuk perlindungan anak dan hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga pengasuhan alternatif.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut di atas berbagai strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar antara lain dengan melaksanakan program yakni: peningkatan kualitas peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; peningkatan sistem pelayanan publik. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga mengeluarkan kebijakan/peraturan dalam rangka pemenuhan hak khususnya bagi ibu dan anak, antara lain: PERDA Nomor 5 Tahun 2004 tentang pembebasan biaya penertiban akta kelahiran, merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar semua anak usia 0–18 tahun dapat memperoleh akta kelahiran tanpa terkecuali. PERDA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, PERDA ini terkait dengan kepemilikan KTP, kartu keluarga dan akta catatan sipil diantaranya akta kematian

dan akta perceraian. PERDA Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis, merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan agar kebutuhan anak terhadap pendidikan dapat terpenuhi, sehingga mengurangi buta aksara dan kebodohan serta menciptakan generasi bangsa yang memiliki harkat, martabat, berakhlak mulia dan mempunyai daya saing di era globalisasi. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rujukan Rawat Jalan bagi masyarakat yang dijamin Pemerintah Kabupaten. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 139 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Subsidi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011.

➤ **Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 telah menentukan target yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: Persentase peserta KB perempuan dan laki-laki ditargetkan mencapai 90% berdasarkan data sektor. Proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera 1 (yang disepakati masyarakat) ditargetkan mencapai 25% berdasarkan data sektor.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut di atas berbagai strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar antara lain dengan melaksanakan program yakni: Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; Pelayanan KIE; Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu; Pembinaan KB; Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling; Kesehatan reproduksi remaja, advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja; Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat; Pelayanan konseling KB; Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi; Pengadaan kontrasepsi dan peralatan medis; Operasionalisasi kelompok masyarakat peduli KB; Koordinasi pengelolaan program; Pengelolaan data dan informasi program KB.

Berdasarkan data dari sektoral, dalam rangka mendorong kesetaraan gender dalam hal ber KB, sangat nampak adanya kesenjangan gender antara akseptor KB perempuan dan akseptor laki-laki. Dimana mayoritas pemakai alat kontrasepsi adalah perempuan. Sangat jelas bahwa, setiap kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar jumlah akseptor KB perempuan jauh lebih banyak dibandingkan akseptor KB laki-laki. Pada tahun 2009 apabila dilihat secara keseluruhan untuk Kabupaten Polewali Mandar maka terdapat 31.658 orang atau 96,24% akseptor KB perempuan

sedangkan laki-lakinya menjadi 1.236 orang atau 3,76% dari total jumlah akseptor Kabupaten Polewali Mandar sejumlah 32.894 akseptor.

Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan pada akseptor KB perempuan yaitu 31.471 orang atau 89,37% dan pada akseptor laki-laki mengalami peningkatan menjadi 3.744 orang atau 10,63%, jadi peserta KB aktif pada tahun 2010 secara keseluruhan sebanyak 35.215 orang.

Angka Pemakaian Alat Kontrasepsi pada PUS di Kabupaten Polewali Mandar dari hasil pengumpulan data sektoral MDGs tahun 2009 sebesar 32.894 atau 59,03% dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 35.215 atau 59,88%.

Untuk Angka Penggunaan Kondom di Kab. Polewali Mandar dari hasil pengumpulan data sektoral MDGs tahun 2009-2010 juga menunjukkan kemajuan dimana mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 1.226 orang atau 2,20% akseptor, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 3.652 orang atau 10,37% akseptor.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Persentase keluarga pra sejahtera Kabupaten Polewali Mandar tahun 2010 sebanyak 23.113, dimana terdapat laki-laki sebanyak 19.207 atau 83,10% dan perempuan 3.906 atau 16,90%.

Sedangkan untuk Keluarga Sejahtera tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana. Persentase keluarga sejahtera tahap I Kabupaten Polewali Mandar tahun 2010 sebanyak 25.682, dimana terdapat laki-laki sebanyak 2.2081 atau 85,98% dan perempuan 3.601 atau 14,02%.

➤ **Bidang Komunikasi dan Informatika**

Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Website milik pemerintah daerah; Website milik pemerintah daerah, dengan capaian kinerja ada (<http://www.polewalimandarkab.go.id>);
- Jumlah pameran/expo; Dengan capaian kinerja sebanyak 2 kali.

➤ **Bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 tidak ditentukan target secara tertulis yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada bidang kesatuan bangsa politik dalam negeri, namun dapat dilihat pada Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Polewali Mandar, yakni mendorong peningkatan pembangunan demokrasi, kesadaran hukum dan HAM serta pendidikan Politik. Hal ini terkait dengan penataan tatanan pengelolaan pemerintah yang salah satu peran utamanya adalah peran pemberdayaan dan demokratisasi yang bertujuan pada peningkatan kemampuan dan perbaikan aturan main dalam interaksi multipihak yang saling membuka diri untuk mendorong perubahan. Sedangkan demokrasi yang merupakan tata kelola yang dijalankan berbasis pada apresiasi terhadap suara dan pilihan semua golongan dan lapisan masyarakat yang bertujuan membangun model kebersamaan dalam menjalankan pembangunan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat membangun birokrasi yang efektif dan efisien.

Demokrasi yang dijalankan di negara kita ini dapat dimaknai sebagai salah satu prosedur untuk memilih pemimpin politik secara terbuka dan kompetitif yang dilaksanakan dalam bentuk pemilihan Kepala Daerah secara langsung di daerah, baik pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota maupun bupati/wakil bupati.

Penerapan kehidupan demokrasi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami perkembangan yang cukup dinamis, hal ini ditandai dengan terlaksananya beberapa agenda Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Legislatif, secara aman dan tertib.

Di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2011 akan berpartisipasi dalam melaksanakan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Bentuk dan kontribusi yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Polewali

Mandar adalah menjaga ketertiban dan keamanan secara umum terkait dengan pelaksanaan Pilkada tersebut agar dapat berlangsung aman, lancar dan terkendali dengan bantuan dan dukungan semua *stakeholder*.

Untuk mendukung terciptanya kondisi tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Program, antara lain: Program penataan peraturan perundang-undangan; Peningkatan kesadaran politik masyarakat; Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat; Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT); Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

➤ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Meskipun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 tidak dicantumkan target yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Namun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap melakukan perhatian untuk melaksanakan pembangunan di perdesaan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat yang ada di desa. Hal ini ditandai dengan pemberian Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa yang bertujuan dalam rangka mencapai kemandirian. Olehnya itu tahun 2011 diluncurkan Alokasi Dana Desa untuk 144 desa.

Sejalan dengan itu, untuk memberi penguatan-penguatan yang ada pada pemerintah desa, maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan program sesuai yang ada pada dokumen RPJMD 2009–2014, yakni: Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa; dan Penataan daerah otonomi baru.

➤ **Bidang Sosial**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 telah menentukan target yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Target tersebut antara lain adalah: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah 1\$ perhari menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015. Proporsi penduduk yang kualitas hidupnya rendah (fakir miskin) ditargetkan mencapai 10% menurut data sektor. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015. Persentase rumah tangga yang menempati

rumah tidak layak huni dan persentase rumah tangga yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan kuisisioner masing-masing ditargetkan 0% pada tahun 2014.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut di atas berbagai strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar antara lain dengan melaksanakan program pada bidang sosial yakni : Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS; Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; Pembinaan anak terlantar; Pembinaan para penyandang cacat dan trauma; Pembinaan panti asuhan/panti jompo; Pembinaan ex.penyandang penyakit sosial (ex.napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); Pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial; Penanganan masalah strategis yang menyangkut TAGANA; Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) keluarga miskin pekerja mandiri sektor informal; Tanggap darurat bencana alam dan bencana banjir.

➤ **Bidang Kebudayaan**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 tidak ditentukan target secara tertulis yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, namun pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap penanganan kebudayaan yang ada di daerah ini.

Dalam rangka penanganan kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar berbagai strategi telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar antara lain dengan melaksanakan program pada bidang kebudayaan, yakni: Pengembangan nilai budaya; Pengelolaan kekayaan budaya; Pengelolaan keragaman budaya; Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; Pengembangan pemasaran pariwisata; Pengembangan destinasi pariwisata; Pengembangan kemitraan.

➤ **Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**

Meskipun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009–2014 tidak tertulis secara langsung target yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang kearsipan dan perpustakaan, namun diharapkan dengan kehadiran bidang kearsipan dan perpustakaan dapat mengembangkan minat baca bagi anak sekolah maupun masyarakat sehingga memiliki pengetahuan, wawasan terhadap berbagai macam disiplin ilmu, untuk pengembangan dirinya dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan serangkaian strategi dengan melaksanakan program pada bidang kearsipan dan perpustakaan, yakni: Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; Peningkatan kualitas pelayanan informasi; Perbaikan sistem administrasi kearsipan; Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan; Peningkatan kualitas pelayanan informasi; Pengembangan data/informasi; Perbaikan sistem administrasi kearsipan/dokumentasi; Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasana dokumen kearsipan; Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Urusan Pilihan :

➤ Bidang Pertanian

Capaian kinerja bidang pertanian dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 219.506, dibagi dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 31.358, dengan capaian kinerja 700 ton/ha.
- Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian untuk tahun 2010 sebesar 599.866,31, dibagi dengan jumlah total PDRB harga konstan 1.283.751,47, dengan capaian kinerja 46,73%.

➤ Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja bidang kelautan dan perikanan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Jumlah produksi perikanan; Jumlah produksi ikan 35.157,22 ton dibagi dengan target daerah sebanyak 34.155,47 ton, dengan capaian kinerja 102,93%.
- Persentase konsumsi ikan; Jumlah konsumsi ikan sebanyak 50,26 dibagi dengan target daerah sebanyak 39,40 dengan capaian kinerja 127,56%.

➤ Bidang Kehutanan

Capaian kinerja bidang kehutanan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Persentase hutan dan lahan kritis; Jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 8.280 Ha, dibagi dengan luas total hutan dan lahan kritis seluas 34.009 Ha, dengan capaian kinerja 24%.

- Persentase kawasan hutan; Luas kerusakan kawasan hutan seluas 22.770 Ha, dibagi dengan luas kawasan hutan seluas 121.490 Ha, dengan capaian kinerja 19%.

➤ **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Capaian kinerja bidang energi dan sumber daya mineral dapat diukur dengan indikator kunci sebagai berikut :

- Pertambangan tanpa ijin; Luas penambangan liar yang ditertibkan seluas 5 Ha dibagi dengan luas areal penambangan liar seluas 10 Ha, dengan capaian kinerja 50%;
- Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB; Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar 3.173,45 dibagi dengan jumlah total PDRB sebesar 1.283.751,47, dengan capaian kinerja 1,25%.

➤ **Bidang Industri**

Capaian kinerja bidang industri dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB; Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri sebesar 37.352,24, dibagi dengan jumlah total PDRB sebesar 1.283.751,47, dengan capaian kinerja 2,90%.
- Pertumbuhan industri; Jumlah industri tahun 2010 sebanyak 6681 dikurangi dengan jumlah industri tahun 2009 sebanyak 6681, dibagi dengan jumlah industri tahun 2010 sebanyak 6681 , dengan capaian kinerja 0%.
- Persentase kontribusi hasil ekspor industri terhadap total ekspor, dengan capaian kinerja 0%.

➤ **Bidang Perdagangan**

Capaian kinerja sektor perdagangan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

- Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebesar Rp. 293.314,67, dibagi dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 1.283.751,47, dengan capaian kinerja 22,85%.
- Ekspor bersih perdagangan, dengan indikator kinerja tidak ada.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

❖ Permasalahan Bidang Fisik dan Prasarana

Permasalahan pada bidang fisik dan prasarana, diantaranya adalah sebagai berikut:

Transportasi

Kondisi wilayah Kabupaten Polewali Mandar memiliki topografi relatif ekstrim, sebagian besar wilayahnya (>78%) memiliki topografi berbukit atau bergunung, dengan kelerengan antara 41% sampai dengan 60%, serta sebagian di atas 60%. Sisanya memiliki topografi datar atau landai dengan kelas lereng rata-rata 2% yang luasannya sekitar 38.300 hektar (18,50% dari total luas wilayah kabupaten). Akibat dari kondisi topografi seperti itu menyebabkan masih banyak daerah yang sulit dijangkau, di samping karena prasarana jalan dan jembatan yang belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, juga disebabkan karena minimnya sarana angkutan.

Kondisi prasarana jalan yang belum memadai akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan atau pemeliharaan jaringan jalan. Kerusakan jaringan jalan yang semakin parah ditambah dengan kondisi armada angkutan umum yang kurang memadai akibat tingginya harga suku cadang berdampak kepada mahal biaya transportasi, banyak kendaraan umum yang sudah tidak layak jalan tetapi tetap dioperasikan.

Akibat dari buruknya kualitas sarana dan prasarana transportasi darat berdampak pada biaya yang mahal, waktu tempuh yang lama, sering terjadi kecelakaan, serta meningkatnya polusi udara dan kebisingan, padahal sistem pelayanan jasa transportasi yang diharapkan adalah layanan jasa transportasi yang terjangkau, nyaman serta aman. Untuk itu, dibutuhkan jasa transportasi alternatif terutama antar wilayah, yang biayanya terjangkau, aman dan nyaman, seperti layanan jasa kereta api.

Sarana dan prasarana transportasi yang ada perlu ditata dengan baik agar sarana dan prasarana dapat saling berinteraksi untuk membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis. Penyusunan sistem tatanan transportasi yang terorganisir dalam lingkup wilayah kabupaten perlu mengacu pada rencana pola dan struktur ruang wilayah. Pola dan

struktur ruang suatu wilayah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pergerakan lalu lintas penumpang dan barang.

Sumberdaya Air dan Irigasi

Potensi sumberdaya air yang ada di Kabupaten Polewali Mandar cukup besar, namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan antara lain karena masih minimnya infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, disamping itu, kualitas sumberdaya manusia pengelola irigasi yang masih rendah, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai pemakai air irigasi. Jumlah daerah irigasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 41 daerah irigasi, baik daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi maupun daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dalam pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi konflik antara kelompok pemakai air, baik pada saat kekurangan air maupun pada saat kelebihan air, hal ini disebabkan, disamping karena kondisi fisik jaringan yang belum memadai, juga karena lembaga pengelola irigasi belum tertata dengan baik. Persoalan mendasar yang juga dihadapi saat ini terkait dengan sumberdaya air dan irigasi adalah belum tersedianya database sumberdaya air dan irigasi sebagai acuan dalam perencanaan, selain itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dan irigasi masih sangat rendah.

Pentingnya pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Polewali Mandar tidak boleh terlepas dari prinsip utama pengelolaan sumberdaya air yaitu pengelolaan wilayah sungai mulai dari hulu, tengah, sampai ke hilir, meliputi:

- a. Pemeliharaan daerah hulu sungai melalui langkah-langkah pelestarian kawasan, pengamanan kawasan penyangga, pelestarian dan pengamanan sumber air, pencegahan erosi, serta pencegahan pencemaran air.
- b. Pengamanan daerah tengah sungai melalui langkah-langkah pelestarian air, pengembangan irigasi, penyediaan air baku, pelestarian air pada badan sungai, dan pencegahan banjir.
- c. Pemeliharaan daerah hilir sungai melalui langkah-langkah pengembangan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, pelaksanaan sistem drainase, pengendalian air bawah tanah, pencegahan pencemaran air, dan pengamanan daerah pantai.

Air Bersih

Cakupan layanan air bersih yang dikelola oleh pihak PDAM di Kabupaten Polewali Mandar masih terbatas hanya melayani masyarakat di kawasan perkotaan, baik ibukota kecamatan maupun Ibukota kabupaten. Pertambahan penduduk serta meningkatnya aktivitas wilayah membutuhkan pasokan air bersih dalam jumlah yang relatif banyak. Untuk memaksimalkan pelayanan ke depan, dapat dilakukan upaya melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan jaringan, serta meminimalisir tingkat kebocoran serta pencarian sumber air baku baru.

Penataan Ruang

Permasalahan pada bidang tata ruang dan pengembangan wilayah adalah penyimpangan pemanfaatan ruang ditunjukkan tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang, alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun). Total luas kawasan hutan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 sekitar ± 94.126 ha dan 33 persen dari total luas hutan yang ada merupakan hutan lindung, yaitu $\pm 69.464,9$ ha.

❖ **Permasalahan Bidang Sosial dan Budaya**

Permasalahan pada bidang sosial dan budaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar yang diperoleh dari hasil data sektoral MDGs kecamatan tahun 2010 antara lain: Rendahnya angka partisipasi pendidikan pra sekolah (4-6 tahun) sebesar 39,64%; Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah pertama 13–15 tahun sebesar 57,63%; Proporsi murid kelas I yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun sebesar 57,66%; Angka putus sekolah dasar sebesar 0,52%.

Kesehatan (Kesehatan dan gizi)

Permasalahan kesehatan anak yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar dari hasil data sektor MDGs tahun 2010 meliputi antara lain: Angka Kematian Bayi (AKB) berkisar 35 per 1000 kelahiran hidup (96 orang); Angka Kematian Anak Balita (AKABA) sebesar 0,4 per 1000 kelahiran hidup (4 balita),

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebesar 212 bayi dari 7.193 bayi lahir hidup atau 2,95%; Proporsi anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak sebesar 7.388 anak atau 92,44%; Pemberian ASI eksklusif sebesar 55,22%; Persentase balita dengan Bawah Garis Merah (BGM) sebesar 780 balita atau 3,17%; Persentase balita yang naik berat badannya sesuai garis pertumbuhan sebesar 73,85%; dan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 96 dari 160 atau 57,83% serta permasalahan kesehatan anak lainnya. Apabila kesehatan anak terganggu, maka akan mudah terkena infeksi dan akibatnya dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental, serta kecerdasannya.

Permasalahan di bidang kesehatan ibu dari hasil data sektor MDGs tahun 2010 ditunjukkan dengan: tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 13 orang, persentase kunjungan K4 sebesar 81,34%, persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 81,94%, angka pemakaian alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15–49 tahun sebesar 35,215 atau 59,88%, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meningkat sebesar 93,03% dari target dan tahun sebelumnya, cakupan pelayanan nifas sebesar 77,16% yang diperoleh dari hasil data sektoral MDGs tahun 2010.

Permasalahan kesehatan dan gizi tersebut pada dasarnya terkait dengan isu-isu utama sebagai berikut: (1) akses dan kualitas pelayanan kesehatan kurang memadai karena kendala jarak, biaya, dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan; (2) rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (*continuum of care*) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; (3) kurangnya jumlah, jenis, dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebaran yang kurang merata; (4) jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin; (5) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum digarap dengan optimal.

Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang ada pada bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar lebih banyak terdapat pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pembangunan bidang kepemudaan yang memiliki permasalahan antara lain; kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, masih banyaknya pengangguran, perilaku menyimpang dan kurangnya kesadaran sosial dikalangan Pemuda. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kepemudaan masih rendah.

Sarana dan prasarana pendukung belum memadai dalam hal pembinaan dan pengembangan pembangunan olahraga rekreasi, prestasi maupun olahraga masyarakat. Kemitraan antara swasta, investor dan masyarakat belum terjalin dengan baik. Belum terwujud pembinaan olahraga secara terpadu dan koordinasi dalam persiapan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, baik secara teknis maupun non teknis masih lemah. Disamping itu juga, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan pembinaan Olahraga hanya pada tingkat sekolah-sekolah melalui anggaran/dana bantuan, serta belum menyentuh kepada pembinaan olahraga di masyarakat karena belum ada wadah yang dibentuk untuk menaunginya.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Permasalahan yang ada di bidang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Polewali Mandar adalah masih rendahnya presentase perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mana masih sangat jauh dari semangat keterwakilan yakni 30% perempuan dalam lembaga publik, terutama dalam hal keterwakilan perempuan baik pada bidang eksekutif, bidang legislatif maupun dalam keanggotaan pengurus pada organisasi sosial.

Termasuk juga masih sangat terbatasnya anggaran sehingga mempengaruhi terbatasnya program/kegiatan yang dilaksanakan terutama yang terkait dengan kesempatan berusaha, akses terhadap pendidikan, dan sering kali perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta lembaga sosial masyarakat baru terbentuk sehingga belum optimal peranan dan partisipasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan permasalahan lain yang ada pada kelompok perlindungan anak di Kabupaten Polewali Mandar dengan trend perkembangan realisasi akta kelahiran usia 0–18 yang 21.402 atau meningkat 22% dari olahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2010 yaitu, lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan; masih rendahnya perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; terbatasnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak terutama layanan pengembangan anak sejak usia dini; dan sangat kurangnya akses anak terhadap area bermain.

Kebudayaan

Permasalahan yang ada pada bidang kebudayaan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah belum teridentifikasinya budaya-budaya yang ada di

daerah ini, termasuk kesenian yang ada belum nampak secara jelas dan utuh karena belum dilaporkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendapatkan Nomor Induk Pokok (NIPOK).

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Meskipun menggembirakan yaitu meningkatnya partisipasi pria dalam program KB di Kabupaten Polewali Mandar, namun masih nampak adanya kesenjangan gender antara akseptor perempuan dengan akseptor laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan jenis alat kontrasepsi bagi akseptor laki-laki.

Di Kabupaten Polewali Mandar mayoritas pemakai alat kontrasepsi adalah perempuan, setiap kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar jumlah akseptor KB perempuan jauh lebih banyak dibandingkan akseptor KB laki-laki. Pada tahun 2009 apabila dilihat secara keseluruhan untuk Kabupaten Polewali Mandar maka terdapat 31.658 orang atau 96,24% akseptor KB perempuan sedangkan laki-lakinya menjadi 1.236 orang atau 3,76% dari total jumlah akseptor Kabupaten Polewali Mandar sejumlah 32.894 akseptor. Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan pada akseptor KB perempuan yaitu 31.471 orang atau 89,37% pada akseptor laki-laki mengalami peningkatan menjadi 3.744 orang atau 10,63%, jadi peserta KB aktif pada tahun 2010 secara keseluruhan sebanyak 35.215 orang.

Sosial

Permasalahan yang ada pada bidang sosial Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa kasus kekerasan baik kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana kasus KTP yang terjadi sebanyak 7 kasus sedangkan kasus KTA sebanyak 38 kasus. Selain meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi juga jumlah wilayah terjadinya kasus juga semakin meluas yang mana tahun 2008 jumlah kecamatan tempat terjadinya kasus sebanyak 4 kecamatan, sedangkan pada tahun 2009 bertambah menjadi sembilan 9 kecamatan dan kecamatan yang terbanyak kasus kekerasan yang terjadi adalah Kecamatan Polewali yakni kasus KTP/KDRT sebanyak empat 4 kasus dan kasus KTA sebanyak 21 kasus.

Pada tahun 2010 tingkat kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan sangat meningkat dari tahun sebelumnya yang mana jumlah kekerasan

terhadap anak tahun 2009 sebanyak 38 kasus sedangkan pada tahun 2010 mencapai 81 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 15 kasus.

Kasus terbanyak yang terjadi pada Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) adalah kasus penganiayaan, yakni pada kasus KTP terdapat sebanyak 14 kasus penganiayaan dan pada kasus KTA terdapat sebanyak 56 kasus penganiayaan. Selanjutnya pada Kasus Kekerasan Seksual yakni sebanyak 17 kasus, Pencabulan 5 kasus pada KTA. Selain dari meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar juga jenis kejahatan yang terjadi semakin bertambah yang mana jenis kasus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya hanya tiga (3) jenis, pada tahun 2010 menjadi lima (5) jenis kasus kejahatan.

Permasalahan lain yang ada adalah kondisi anak cacat yang membutuhkan perhatian kita semua. Masih banyak anak cacat yang belum terdata disebabkan ketidakpedulian orang tua karena merasa malu melaporkan anak cacat di keluarganya. Kurangnya data yang ada mengenai anak cacat menyebabkan pemerintah kurang memberikan respon terhadap dukungan anak cacat secara utuh, hal inilah yang mempengaruhi sehingga bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk anak cacat tidak merata.

❖ **Permasalahan Bidang Ekonomi**

Permasalahan pada bidang ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertanian

Permasalahan yang ada pada bidang pertanian diantaranya adalah (i)ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih terbatas; (ii)rendahnya tingkat SDM sektor pertanian dan peternakan; (iii)daya serap petani terhadap paket teknologi tepat guna masih rendah; dan (iv)kurangnya modal usaha yang dimiliki petani.

Ketahanan Pangan

Permasalahan yang ada pada bidang ketahanan pangan diantaranya adalah (i)intensifikasi pertanian terhambat akibat jumlah pengolahan tanah masih terbatas; (ii)tingkat serangan hama/penyakit semakin tinggi; (iii)tingkat penularan dan penyebaran penyakit pada ternak masih tinggi; (iv)rendahnya adopsi teknologi dan manajemen budidaya ternak oleh petani; (v)sarana dan prasarana inseminasi

buatan masih terbatas; (vi)belum tersedianya rumah potong hewan yang higienis; (vii)dukungan dana yang masih terbatas.

Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang ada pada bidang kelautan dan perikanan diantaranya adalah (i)tingginya masyarakat miskin di wilayah pesisir; (ii)menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan laut; (iii)potensi sumberdaya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil belum dioperasikan; (iv)rendahnya mutu hasil perikanan tentang komoditas ekspor yang dihasilkan nelayan; dan (v)sistim mitigasi bencana alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum dilakukan.

Kehutanan dan Perkebunan

Permasalahan yang ada pada bidang kehutanan dan perkebunan diantaranya adalah (i)banyak lahan terkikis; (ii)kebakaran hutan sering terjadi; dan (iii) ilegal logging atau penyelundupan kayu.

Perindustrian

Permasalahan yang ada pada bidang perindustrian diantaranya adalah (i)sumberdaya pengrajin relatif masih rendah; (ii)pemanfaatan potensi lokal relatif masih rendah; dan (ii)keterbatasan dalam mengakses pasar.

Perdagangan

Permasalahan yang ada pada bidang perdagangan diantaranya adalah (i)terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran; dan (ii)pedagang kaki lima dan asongan belum tertata dengan baik.

Tenaga Kerja

Permasalahan yang ada pada bidang tenaga kerja diantaranya adalah (i)keterampilan tenaga kerja relatif terbatas; dan (ii)keterbatasan sarana dan prasarana balai latihan kerja.

Koperasi dan UMKM

Permasalahan yang ada pada bidang koperasi dan UMKM diantaranya adalah (i)kemandirian koperasi dan UMKM sebagai lembaga otonom/independen belum sepenuhnya dimiliki; (ii)SDM pengurus/pengelola koperasi dan pengusaha mikro kecil dan menengah belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman teknis perkoperasian serta manajemen usaha; (iii)manajemen koperasi dan pengusaha mikro kecil dan menengah belum berfungsi secara efektif dan efisien; (iv)permodalan koperasi dan pengusaha mikro kecil dan menengah masih lemah terutama yang berkaitan dengan struktur

permodalan (modal luar lebih besar daripada modal sendiri); (v) skala usaha koperasi dan pengusaha mikro kecil dan menengah sangat terbatas; dan (vi) kemitraan (kerjasama usaha) koperasi dan pengusaha mikro kecil dan menengah baik secara vertikal maupun horizontal dengan BUMN/BUMD belum berkembang secara proporsional.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Tahun 2010

| No. | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan | Permasalahan |
|-----|---|--------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | |
| | a. Tataran Pengambil Kebijakan | | | |
| | Ketentraman dan ketertiban umum daerah | Wajib | <p>1. Keberadaan Perda tentang ketertiban penataan ruang</p> <p>2. Peraturan tentang kependudukan</p> <p>3. Kebijakan ketersediaan aparatur Trantibum</p> | <p>- Persentase rumah yang memiliki IMB masih sangat rendah, yaitu 0,4% atau sama dengan 315 rumah dari 80.162 rumah se Kabupaten Polewali Mandar;</p> <p>- Belum efektifnya Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga perlunya mengaktifkan Perda tersebut melalui penerapan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek jera (baik kepada aparat maupun masyarakat);</p> <p>- Kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kabupaten Polewali Mandar berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB.</p> <p>Walaupun saat ini telah ada beberapa Perda dan Perbup yang mengatur urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Polewali Mandar, namun pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil belum maksimal, hal ini ditandakan dengan masih relatif rendahnya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, KTP dan kartu keluarga. Sehingga perlu dukungan pelayanan pada tingkat desa dan kecamatan.</p> <p>- Jumlah personil satpol PP adalah 139 orang dibandingkan jumlah penduduk Polewali Mandar 373.262 jiwa, sehingga jika ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu penambahan jumlah personil satpol PP;</p> <p>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan.</p> |

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| | | | 4. Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL dan PMKS | Perda tentang PSK, PKL dan PMKS diatur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Permasalahan saat ini adalah peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. |
| | | | 5. Peraturan tentang kebersihan kabupaten | Payung hukum tentang persampahan, kebersihan dan sanitasi di Kabupaten Polewali Mandar diatur melalui Perda Nomor 16 Tahun 2007. Permasalahan saat ini diantaranya adalah : - Penanganan persampahan di Kabupaten Polewali Mandar secara umum masih relatif rendah, oleh karenanya diperlukan peningkatan sarana persampahan terutama di perkotaan; - Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah persampahan dan kebersihan masih relatif rendah. |
| | Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah | Wajib | 1. Penyampaian laporan kepada pemerintah | Tidak ada masalah. (Ketepatan waktu penyampaian LPPD telah sesuai amanat PP Nomor 3 tahun 2010). |
| | | | 2. Penyampaian laporan keuangan dan kinerja | Tidak ada masalah. (Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja telah sesuai amanat PP Nomor 8 tahun 2008). |
| | | | 3. Hubungan antar daerah | Perlunya peningkatan kerjasama dengan daerah lain pada berbagai sektor dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pada tahun 2010 kerjasama Pemkab Polewali Mandar dengan daerah lain adalah kerjasama sinkronisasi tata ruang dengan kabupaten tetangga. Selain itu juga telah ada kerjasama pada sektor kesehatan, pendidikan dan bencana. |

| | | | | |
|--|--|-------|---|---|
| | Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah | Wajib | 1. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah | Program-program pada RKPD 2010 telah mendukung 11 prioritas nasional yang ditetapkan dalam RKP 2010. Tetapi sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten belum optimal, sehingga masih terjadi tumpang tindih (<i>over lapping</i>) kegiatan. |
| | | | 2. Kewenangan | Dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka permasalahannya adalah : - untuk urusan wajib penanaman modal, tidak ada SKPD pelaksana yang menyelenggarakan urusan penanaman modal tersebut. - untuk urusan pilihan transmigrasi diselenggarakan oleh Dinas Sosnakertrans, tetapi tidak ada program/kegiatan yang dilaksanakan terkait urusan transmigrasi tersebut. |
| | | | 3. Keuangan | Tidak ada masalah. (Penetapan perda APBD 2010 tepat waktu, dan adanya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah) |
| | | | 4. Pelayanan publik | Telah adanya Perda tentang penyelenggaraan retribusi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta Perda tentang pendidikan gratis. Tetapi kualitas pelayanan publik Pemkab Polewali Mandar belum dapat dikatakan memenuhi tingkat kepuasan publik sebagai pengguna atau penerima jasa layanan, dengan alasan: masih adanya keluhan mengenai tingkat pelayanan yang buruk, birokrasi yang berbelit-belit, dan kurangnya sanksi yang tegas kepada petugas (PNS) penyelenggara pelayanan publik yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan publik, 2010) |

| | | | | |
|--|---|-------|-------------------------------------|--|
| | | | 5. Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya kajian berapa rasio ideal PNS dibanding masyarakat yang dilayani, sehingga tercipta rasio ideal PNS di Kabupaten Polewali Mandar dengan masyarakat yang dilayani. (Rasio PNS terhadap penduduk pada tahun 2010 di Polewali Mandar sebesar 0,019). - Distribusi PNS (terutama guru dan tenaga medis) yang tidak merata, dimana masih ada daerah yang kekurangan guru, dan ada daerah yang kelebihan guru. |
| | | | 6. Kelembagaan | <p>Jumlah SKPD Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 55 unit. Pembentukan/penataan SKPD tersebut berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007. Walaupun demikian, kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi masih kurang proporsional.</p> |
| | Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD | Wajib | 1. Perda yang ditetapkan | Tidak ada masalah. (Perda yang ditetapkan dalam tahun 2010 sebanyak 21 Perda). |
| | | | 2. Ranperda yang disetujui DPRD | Tidak ada masalah. (Seluruh Ranperda yang diusulkan tahun 2010, disetujui oleh DPRD). |
| | Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan | Wajib | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | Tidak ada masalah. (Keputusan DPRD yang dihasilkan tahun 2010 sebanyak 21 keputusan). |
| | Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan | Wajib | 1. Tindaklanjut keputusan bupati | Tidak ada masalah. (Sebanyak 538 Keputusan Bupati dihasilkan pada tahun 2010). |
| | | | 2. Tindaklanjut peraturan bupati | Tidak ada masalah. (Sebanyak 26 Peraturan Bupati dihasilkan pada tahun 2010). |
| | Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan | Wajib | Perda yang dibatalkan | Tidak ada masalah. (Tidak ada Perda yang dibatalkan pada tahun 2010). |

| | | | | |
|--|--|-------|---|---|
| | Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah | Wajib | 1. Perda tentang konsultasi publik | Belum adanya Perda ataupun Perbup yang mengatur tentang konsultasi publik. |
| | | | 2. Media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik | Masih kurangnya jumlah media informasi Pemda Polewali Mandar yang ada dan dapat diakses oleh publik. |
| | Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil | Wajib | 1. Serapan dana perimbangan | Tidak ada masalah. (Persentase dana perimbangan yang diserap dibanding yang direncanakan yaitu, sebesar 99,4%). |
| | | | 2. Alokasi belanja pada APBD dari DAU | Tidak ada masalah. (Persentase belanja publik terhadap DAU yaitu, sebesar 56%). |
| | | | 3. Alokasi belanja pada APBD | Tidak ada masalah. (Persentase belanja langsung terhadap total APBD yaitu, sebesar 39,33%). |
| | Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah | Wajib | Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Masih relatif rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan dalam APBD yaitu, sebesar 3,11% |
| | Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD | Wajib | 1. Kewajaran laporan keuangan | Opini BPK tahun 2009 adalah WDP |
| | | | 2. Besaran SiLPA | Persentase SiLPA terhadap total pendapatan, sebesar 5,48%. Besaran SiLPA setiap tahun harusnya menunjukkan tren menurun, yang dapat diartikan bahwa disparitas antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaannya yang semakin mengecil menunjukkan bahwa proses perencanaan dilaksanakan dengan cermat sehingga akan lebih baik pada tingkat pelaksanaannya. |
| | | | 3. Realisasi belanja | Tidak ada masalah. (Persentase realisasi belanja terhadap total belanja APBD yaitu, sebesar 92%). |
| | | | 4. Pengawasan Inspektorat daerah | Tidak ada masalah. (Temuan BPK RI sampai akhir tahun 2009 sebanyak 12 temuan yang kemudian seluruhnya ditindaklanjuti sampai tahun 2010) |

| | | | | |
|--|--|-------|---|--|
| | Pengelolaan potensi daerah | Wajib | 1. Realisasi PAD | Rasio realisasi PAD 2010 terhadap potensi PAD 2010, sebesar 75,32%. Rasio ini masih harus terus ditingkatkan persentasenya. |
| | | | 2. Peningkatan PAD | Masih relatif rendahnya persentase peningkatan PAD dari tahun 2009 ke tahun 2010 yaitu sebesar 28,98%. |
| | Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Wajib | 1. Penghargaan | Tidak ada masalah. (Dalam tahun 2010, Pemerintah memberikan penghargaan Satya Lancana Wira Karya dan Manggala Karya Satya kepada Pemda Polewali Mandar). |
| | | | 2. Pengadaan barang dan jasa | Tidak ada masalah. (Adanya E-procurement). |
| | | | 3. Daya saing daerah | Tidak ada masalah. (Jumlah ijin investasi pada tahun 2010 sebanyak 10 ijin). |
| | | | | |
| | b. Tataran Pelaksana Kebijakan | | | |
| | Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan | Wajib | 1. Program Nasional (yang melekat di Kementerian/LPMD) yang harus dilaksanakan | Persentase jumlah program nasional urusan wajib/pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah 50% adalah SKPD: Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Inspektorat, Dinas Kelautan dan Perikanan. |
| | | | 2. Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Departemen/LPMD | Keberadaan SOP urusan wajib/pilihan terdapat pada beberapa SKPD yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendapatan dan Perizinan, Inspektorat. |
| | Ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan | Wajib | Jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut KM/Peraturan | SKPD yang melaksanakan 100% adalah Dinas Lingkungan Hidup, BP4KKP, Kantor Satpol PP, Kantor Kesbang dan Linmas. Sementara Disdikpora untuk urusan pendidikan sebesar 16% dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 0%. |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------|--|---|
| | Penataan kelembagaan daerah | Wajib | Pengisian struktur jabatan | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah jabatan dan dan eselonering yang terisi pada setiap SKPD sebagian besar sudah 100%, sehingga tidak ada masalah pada aspek ini. - Jabatan fungsional telah ada pada beberapa SKPD, yaitu: Disdikpora untuk urusan pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi untuk urusan perhubungan; BKDD; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes; BP4KKP; Inspektorat. |
| | Pengelolaan kepegawaian daerah | Wajib | 1. Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan yang terkait | <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan kompetensi SDM pada setiap SKPD; - Sistem manajemen kepegawaian yang ada belum mampu mendorong peningkatan kompetensi SDM dan profesionalitas. |
| 2. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan | | | Tidak ada masalah. Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan (Diklatpin) pada setiap SKPD sebagian besar sudah 100%. | |
| 3. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | | | Tidak ada masalah. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan pada setiap SKPD (urusan) sebagian besar sudah 100%. | |
| | Perencanaan pembangunan daerah | Wajib | 1. Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD | Tidak ada masalah. (Seluruh SKPD memiliki dokumen Renstra, Renja dan RKA). |
| | | | 2. Sinkronisasi program renja SKPD dengan program RKPD | Tidak ada masalah. (Persentase jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD sebagian besar mencapai 100% pada setiap urusan). |

| | | | | |
|--|--|-------|---|---|
| | | | 3. Sinkronisasi program renja SKPD dengan program RKA SKPD | Tidak ada masalah. (Persentase jumlah program Renja RKPД yang diakomodir dalam RKA SKPD sebagian besar mencapai 100% pada setiap urusan). |
| | | | 4. Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran | Tidak ada masalah. (Persentase jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebagian besar mencapai 100% pada setiap urusan). |
| | Pengelolaan keuangan daerah | Wajib | 1. Realisasi anggaran | Tidak ada masalah. |
| | | | 2. Belanja modal terhadap total belanja SKPD | Tidak ada masalah. |
| | | | 3. Besaran belanja pemeliharaan | Tidak ada masalah. |
| | | | 4. Laporan keuangan | Tidak ada masalah. |
| | Pengelolaan barang milik daerah | Wajib | 1. Manajemen asset SKPD | Tidak ada masalah. (Adanya inventarisasi barang/asset SKPD untuk setiap urusan wajib/pilihan). |
| | | | 2. Penggunaan asset SKPD | Tidak ada masalah. (Asset yang ada pada SKPD, hampir semuanya masih digunakan/dimanfaatkan). |
| | Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat | Wajib | 1. Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat | Tidak ada masalah. (Seluruh SKPD telah menyediakan fasilitas/prasarana informasi, diantaranya berupa: papan pengumuman, leaflet, pos pengaduan, baliho, pengumuman mass media, website, mobil keliling). |
| | | | 2. Responsifitas terhadap partisipasi masyarakat | SKPD yang tidak ada survey kepuasan masyarakat diantaranya: Dinas PU, Dinas Hutbun, Dinas Sosnakertrans, Dinas Tarkim, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. |

| | | | | |
|-----|--|-------|---|---|
| II. | Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | |
| | Kesejahteraan masyarakat | Wajib | <p>1. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi</p> <p>2. Kesejahteraan sosial</p> | <p>Pembangunan perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar selama periode lima tahun terakhir 2005-2009, terus mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Polewali Mandar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan. Jika ditinjau dari pembentukan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Sulawesi Barat, kabupaten dengan nilai kontribusi terbesar adalah Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 31,15% pada tahun 2009;</p> <p>Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengetahui PDRB per kapita dalam tahun tertentu. Walaupun secara total PDRB Kabupaten Polewali Mandar terbesar kontribusinya di wilayah Sulawesi Barat, namun berdasarkan nilai PDRB perkapita menempati urutan terakhir, pada tahun 2009 sebesar 7.034.539 rupiah atau sekitar 1,24% di bawah PDRB perkapita Sulawesi Barat.</p> <p>Komponen utama indikator pembangunan kesejahteraan sosial adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pendapatan. Ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu 2007-2009 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, Indeks Pendidikan mencapai angka 71,20; Indeks Kesehatan mencapai angka 66,19; Kemampuan daya beli masyarakat mencapai Rp 630,16 ribu. Ketiga komponen tersebut harus terus diupayakan mengalami peningkatan sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.</p> |

| | | | | |
|--|----------------|-------|----------------------|--|
| | Pelayanan umum | Wajib | 1. Sarana pendidikan | <p>Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas, dan terjangkau;</p> <p>Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah-daerah terpencil. Isu yang masih sering terdengar bahwa banyaknya guru enggan ditempatkan pada daerah terpencil tersebut sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah-daerah perkotaan.</p> <p>Beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera, diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan pra sekolah (4-6 tahun) sebesar 39,64%; ▪ Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah pertama (13-15 thn) sebesar 57,63%; ▪ Proporsi murid kelas I yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun sebesar 57,66%; ▪ Angka putus sekolah di jenjang SD/MI yaitu sebesar 309 anak. |
| | | | 2. Sarana kesehatan | <p>Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti pada bidang kesehatan, beberapa permasalahan diantaranya adalah:</p> <p>- <i>Permasalahan di bidang kesehatan anak</i> : Angka Kematian Bayi (AKB) berkisar 35 per 1000 kelahiran hidup (96 orang); Angka Kematian Anak Balita (AKABA) sebesar 0,4 per 1000 kelahiran hidup (4 balita); Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebesar 212 bayi dari 7.193 bayi lahir hidup atau 2,95%; Proporsi anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak sebesar 7.388 anak</p> |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|
| | | | | <p>atau 92.44%; Pemberian ASI eksklusif sebesar 55,22%; Persentase balita dengan Bawah Garis Merah (BGM) sebesar 780 balita atau 3,17%; Persentase balita yang naik berat badannya sesuai garis pertumbuhan sebesar 73,85%; dan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) sebesar 96 dari 160 atau 57,83%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Permasalahan di bidang kesehatan ibu</i> : Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 13 orang; Persentase kunjungan K4 sebesar 81,34%; Persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 81,94%; Angka pemakaian alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15–49 tahun sebesar 35,215 atau 59,88%; Cakupan pelayanan nifas sebesar 77,16%. |
| | | | 3. Sarana lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan persampahan secara umum masih relatif rendah; - Sistem layanan air bersih yang dikelola oleh PDAM masih sangat terbatas. |
| | | | 4. Sarana perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2009, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 343,99 km atau sama dengan 22,43% dari jumlah panjang seluruh jalan Kabupaten Polewali Mandar sepanjang 1.533,74 km. Tingginya persentase panjang jalan dalam kondisi yang tidak baik (77,57%), harus mendapat perhatian ekstra, untuk menghindari terjadinya perlambatan pembangunan akibat dari tidak lancarnya jalur transportasi; - Pelabuhan Polewali yang direlokasi ke Pelabuhan Tanjungsilopo Kecamatan Binuang, sampai saat ini belum bisa beroperasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum tersedia, seperti jalan akses ke pelabuhan belum selesai, pergudangan, area parkir, listrik dan air bersih sampai saat ini belum tersedia. |

| | | | | |
|--|-------------------|---------|--------------------------------------|---|
| | | | 5. Sarana tempat Ibadah | Tempat ibadah bagi masing-masing penganut agama yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, dianggap cukup memadai. Kecuali untuk penganut Agama Hindu yang jumlahnya 207 orang belum tersedia tempat ibadah bagi mereka. |
| | | | 6. Sarana komunikasi dan informatika | Tidak ada masalah. Cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi (sambungan telepon) belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Namun demikian, akibat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, maka jaringan telekomunikasi bergerak (<i>selular</i>) sudah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Begitu pula cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Polewali Mandar. |
| | | | 7. Sarana pemuda dan olahraga | <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dibidang kepemudaan antara lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewedahi aktifitas dan kreatifitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; - Permasalahan dibidang keolahragaan antara lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, serta pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis. |
| | Daya saing daerah | Pilihan | 1. Kemampuan ekonomi daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Penduduk yang berada pada golongan pengeluaran per kapita antara Rp.200.000 – Rp.299.999 masih relatif tinggi, yaitu 35,95% pada tahun 2009; - Rata-rata penduduk di Kabupaten Polewali Mandar masih menggunakan lebih dari 50% pendapatannya untuk mengkonsumsi makanan yaitu, sebesar 59,41% pada tahun 2009. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>2. Iklim berinvestasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Investor belum banyak tertarik berinvestasi di Kabupaten Polewali Mandar karena kondisi sosial ekonomi masyarakat Polewali Mandar;- Masih belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam mendukung investasi daerah. |
| | | | | <p>3. Sumberdaya manusia</p> <ul style="list-style-type: none">- Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat, sehingga merupakan asset penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan di Polewali Mandar;- Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Polewali Mandar saat ini adalah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. |